DAFTAR PUSTAKA

Aas Arbi. 2016. *Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah*.

Anonim. 2016. *Pengertian Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*.

Direk Jenderal Pajak. *Panduan Pembuatan Mapping, Profil WP dan Feeding*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

KEP-161/PJ/2001 *Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusam Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206.2/PMK.01/2014

Per-16/PJ/2007 *Tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja dan Bendaharawan Pemerintah*.

Per-116/PJ/2007 *Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.*

SE-06/PJ.9/2001 *Tentang Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*.

SE-59/PJ/2008 *Tentang Pemberian NPWP bagi Karyawan*.

SE-24/PJ/2007 *Tentang Penjelasan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA